**ANALISA KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA LUBUKLINGGAU DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN,EFEKTIVITAS, EFISIENSI, AKTIVITAS, DAN PERTUMBUHAN PERIODE 2016-2020**

**Marta Pebriansyah1, Dewi Anggraini2, Yuli Nurhayati3**

1Program Studi Manajemen, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

2,3Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia

**Email:** 1marta.pebriansyah@gmail.com, 2yuli\_nurhayati@univbinainsan.ac.id,3dewi\_anggraini@univbinainsan.ac.id

**Abstrak**

Masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau (BPKAD) Kota Lubuklinggau ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatakan deskriptif. Teknik analisa yang digunakan adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas/Analisis Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong Sangat rendah karena rata-rata rasio hanya mencapai 12% dengan pola hubungan instruktif, Rasio Efektivitas masih tergolong Kurang Efektif dengan rata-rata rasio mencapai 82%, Rasio Efisiensi tergolong Tidak Efisien dengan rata-rata rasio mencapai 951%, Rasio Aktivitas keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau dikategorikan Tidak Serasi dengan alokasi sebagian dana untuk belanja operasi rata-rata rasio 72% dan belanja modal rata-rata rasio 27%, dan Rasio Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan dengan rata-rata rasio 6%, Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata rasio 4% dan Belanja daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata rasio mencapai 6%.

**Kata kunci** ; Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi,

Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

***Abstract***

*The problem in this study is to determine the financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency of Lubuklinggau City (BPKAD) of Lubuklinggau City in terms of the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The analysis technique used is the Ratio of Independence, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio / Conformity Analysis, and Growth Ratio. The results show that the financial performance of the Lubuklinggau City Government in terms of the Regional Financial Independence Ratio is very low because the average ratio only reaches 12% with an instructive relationship pattern, the Effectiveness Ratio is still classified as Less Effective with an average ratio of 82%, the Efficiency Ratio is classified as Inefficient with an average ratio of 951%, the Financial Activity Ratio of the Lubuklinggau City Government is categorized as Incompatible with the allocation of part of the funds for operating expenditures an average ratio of 72% and an average capital expenditure ratio of 27%, and the growth ratio of regional original income ( PAD) grew by an average ratio of 6%, regional income grew by an average ratio of 4% and regional spending grew by an average ratio of 6%.*

***Keywords*** *; Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency.*

*Ratio, Activity Ratio, and Growth Ratio.*

# PENDAHULUAN

 Menurut (Sujarweni, 2015, hlm. 107–110) dikutip dari Mardiasmo (2002) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. informasi finansial untuk melakukan penilaian kinerja finansial dengan menganalisa varians antara kinerja aktual/realisasi dengan yang dianggarkan, analisa varians secara garis besar berupa varians pendapatan, varians pengeluaran, varians belanja rutin, dan varians belanja modal. Setelah analisa varians dilanjutkan dengan mengidentifikasi sumber penyebab terjadinya varians tersebut varians (Sujarweni, 2015)

 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 21 Tahun 2019 (Peraturan Walikota Lubuklinggau, 2019). Dalam menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sebagai pembantu pemerintah kota lubuklinggau yang telah dijelaskan diatas mengenai tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa pendapatan dan analisa belanja daerah yang telah ditetapkan. Analisa rasio keuangan yang akan digunakan adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas (keserasian belanja), dan Rasio Pertumbuhan. terdapat beberapa isu permasalahan antara lain : 1. Pendapatan daerah didominasi oleh pendapat transfer yang terdiri dari dana provinsi, pusat dan pinjaman dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan adanya ketidakmandirian dari daerah. 2. Pendapatan asli daerah belum cukup dalam memenuhi target yang ditentukan sehingga tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah masih belum terpenuhi. 3. Pendapatan asli daerah masih sangat minim atau lebih kecil jika dibandingkan besaran Belanja daerah yang dimana biaya realisasi tersebut sangat besar. 4. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, modal, dan tak terduga. Besaran belanja daerah dialokasikan pada belanja operasi dibandingkan belanja modal dan tak terduga. 5. Pendapatan daerah, pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan belanja daerah adanya peningkatan setiap tahunnya terkecuali tahun 2020 mengalami penurunan, bagaimana tingkat pertumbuhannya, apakah positif atau negatif?

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisa kinerja keuangan daerah dengan rasio keuangan. Penelitian (Hartoyo & Arsad, 2021) menunjukkan hasil Penelitian bahwa kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Dompu dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungan instruktif dengan rata-rata rasio sebesar 7,17%. Rasio efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Dompu sudah efektif karena rata-rata 108,71%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi 99,61%. Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99%.

(Qur’ani & Panggiarti, 2021) bahwa Hasil penelitian rasio kemandirian 38,73% tergolong rendah, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio efisiensi 100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian / aktivitas belanja tergolong tidak efisien. Rasio belanja operasional 87,16% dan rasio belanja modal 24,66%, dan rasio pertumbuhan 10,16% tergolong rendah. (Kusumadewi, 2021) Hasil penelitian bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cukup baik. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup efektif dan efisien. Pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Perhitungan rasio keserasian belanja operasi mendominasi alokasi belanja daerah alih-alih belanja modal.

(Fornia dkk., 2021) hasil Penelitian bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, rasio derajat desentralisasi kategori kurang, rasio efektifitas sangat efektif, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami kenaikan dan penurunan, dan rasio efisiensi belanja efisien. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau Ditinjau Dari Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Aktivitas, Dan Pertumbuhan Periode 2016-2020”.

 Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, dan Pertumbuhan periode 2016-2020. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas, dan Pertumbuhan periode 2016-2020.

## METODOLOGI PENELITIAN

## I.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau yang berlokasi dijalan Garuda No. 10 Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Barat I. Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif . Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yakni Laporan Realisasi Anggaran selama periode 2016-202.

## 2.2 Kerangka Berpikir

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Lubukllinggau Periode 2016-2020

Pertumbuhan

Aktivitas

Efisiensi

Efektivitas

Kemandirian

Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau

Sumber : Data Diolah, 2022

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

## 2.3 Teknik Analisis Data

#### a. Rasio Kemandirian

 Menurut (Mahmudi, 2019) Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. rasio kemandirian daerah dihitung dengan rumus

**Tabel 1. Kriteria Kemandirian Pemerintah Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kemanpuan Keuangan. | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
| Rendah Sekali | 0-25 | Instruktif., |
| Rendah | 25-50 | Konsultatif., |
| Sedang | 50-75 | Partisipatif., |
| Tinggi | 75-100 | Delegatif,. |

Sumber : (Mahmudi, 2019)

 Berdasarkan pendapat (Halim, 2007 dalam Qur’ani & Panggiarti, 2021) pola hubungan memiliki beberapa hubungan yakni : 1.Pola hubungan Instruktif merupakan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 2.Pola hubungan konsultatif merupakan kontribusi pemerintah pusat sudah mulai berkurang. 3.Pola hubungan partisipatif merupakan peranan pemerintah pusat semakin berkurang hal tersebut tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan telah mendekati mampu. 4.Pola hubungan delegatif merupakan suatu daerah telah mampu dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.

#### b. Rasio Efektivitas

 Menurut (Mahmudi, 2019) Rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio yang mengukur dan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| Kriteria Efektivitas (%) | Persentase Efektivitas |
| >100 | Sangat Efektif. |
| 100 | Efektif. |
| 90-99 | Cukup Efektif. |
| 75-89 | Kurang Efektif. |
| <75 | Tidak Efektif. |

Sumber : (Mahmudi, 2019)

#### c. Rasio Efisiensi

 Menurut (Mahmudi, 2019) rasio efisiensi merupakan rasio yang dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| Kriteria Efisiensi (%) | Persentase Efisiensi |
| <10 | Sangat Efisiensi, |
| 10-20 | Efisien, |
| 21-30 | Cukup Efisien, |
| 31-40 | Kurang Efisien, |
| >40 | Tidak Efesien. |

 Sumber : (Mahmudi, 2019)

#### d. Rasio Aktivitas

Dikutip dari (Halim, 2007 dalam Qur’ani & Panggiarti, 2021)) Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

**1. Rasio belanja Operasi**

 Menurut (Mahmudi, 2019) pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi memiliki porsi belanja operasi lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Rasio operasi terhadap modal dirumuskan sebagai berikut :

**2. Rasio Belanja Modal**

 Menurut (Mahmudi, 2019) pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi memiliki porsi belanja modal lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatan rendah. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 5-20 persen. Rasio belanja modal dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 4. Kriteria Penilaian Rasio aktivitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kriterian Penilaian | Proporsi | Keterangan |
| 1 | Belanja Operasi Terhadap Total Belanja | 60-90% | Jika sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan maka dikategorikan serasi,tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka tidak serasi. |
| 2 | Belanja Modal Terhadap Total Belanja | 5-20% |

Sumber : (Mahmudi, 2019)

**e. Rasio Pertumbuhan**

 Menurut (Mahmudi, 2019) Rasio pertumbuhan merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pertumbuhan PAD | Realisasi Penerimaan PAD t-Realisasi Penerimaan PAD t-1 | x100% |
| Realisasi Penerimaan PAD t-1 |
|  |  |  |  |
| 2 | Pertumbuhan Pendapatan | Pendapatan t-Pendapatan t-1 | x100% |
| Pendapatan t-1 |
|  |  |  |  |
| 3 | Pertumbuhan Belanja daerah | Realisasi Belanja Daerah t-Realisasi Belanja Daerah t-1 | x100% |
| Realisasi Belanja Daerah t-1 |

**Tabel 5. Kriteria penilaian rasio pertumbuhan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rasio** **Pertumbuhan.** | **Kriteria Penilaian****Rasio Pertumbuhan.** |
| Positif | Naik |
| Negatif | Turun |

## Sumber : (Mahmudi, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian

### 1. Rasio Kemandirian

 Perhitungan rasio kemandirian pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 7. sebagai berikut :

**Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian (dalam rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **Pendapatan Transfer** | **Rasio Kemandirian** | **Kemampuan Keuangan** | **Pola Hubungan** |
| **a** | **b** | **C=a/b x 100%** |
| 2016 | 75.797.426.519,36 | 807.832.268.410,62 | 9% |  Rendah Sekali | Instruktif |
| 2017 | 115.521.939.795,78 | 788.674.051.204,20 | 15% |  Rendah Sekali | Instruktif |
| 2018 | 105.606.815.786,70 | 790.476.187.559,56 | 13% |  Rendah Sekali | Instruktif |
| 2019 | 100.950.256.993,95 | 900.083.616.227,99 | 11% |  Rendah Sekali | Instruktif |
| 2020 | 86.319.561.348,87 | 908.254.490.662,72 | 10% |  Rendah Sekali | Instruktif |
| **Rata-rata** | **12%** |  Rendah Sekali | Instruktif |

Sumber : Data Diolah, 2022

 Berdasarkan Tabel 6. perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2016 mencapai 9%, pada tahun 2017 rasio kemandirian naik menjadi 15%, pada tahun 2018 rasio kemandirian turun menjadi 13%, rasio kemandirian pada tahun 2019 turun

kembali menjadi 11%, dan rasio kemandirian pada tahun 2020 turun kembali menjadi 10%. rata-rata rasio kemandirian mencapai 12% dikategorikan sangat rendah dan berpola instruktif.

### 2 Rasio Efektivitas

 Perhitungan rasio efektivitas pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 8. sebagai berikut :

**Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektivitas (dalam rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi PAD** | **Anggaran PAD** | **Rasio Efektivitas** | **Kriteria** |
| **a** | **b** | **c =a/b x 100%** |
| 2016 | 75.797.426.519,36 | 115.046.209.966,89 | 66% | Tidak Efektif |
| 2017 | 115.521.939.795,78 | 146.720.756.033,00 | 79% | Kurang Efektif |
| 2018 | 105.606.815.786,70 | 126.713.124.144,35 | 83% | Kurang Efektif |
| 2019 | 100.950.256.993,95 | 110.089.253.223,08 | 92% | Cukup Efektif |
| 2020 | 86.319.561.348,87 | 97.870.799.828,72 | 88% | Kurang Efektif |
| **Rata-rata** | **82%** | Kurang Efektif |

Sumber : Data Diolah, 2022

 Berdasarkan hasil pada tabel 7 perhitungan rasio efektivitas pada tabel diatas menunjukkan Pada tahun 2016 rasio efektivitas sebesar 66%, pada tahun 2017 ada peningkatan rasio efektivitas menjadi 79%, pada tahun 2018 rasio efektivitas naik menjadi 83%, sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas naik menjadi 92%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan rasio dengan persentase rasio sebesar 88%. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 82% dengan kategori kurang efektif.

### 3 Rasio Efisiensi

 Perhitungan rasio efisiensi pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut :

**Tabel 8. Perhitungan Rasio Efisiensi (dalam rupiah)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Belanja Daerah** | **Realisasi PAD** | **Rasio Efisiensi** | **Kriteria** |
| **a** | **b** | **c = a/b x 100%** |
| 2016 | 809.943.066.643,08 | 75.797.426.519,36 | 1069% | Tidak Efisien |
| 2017 | 870.709.076.209,71 | 115.521.939.795,78 | 754% | Tidak Efisien |
| 2018 | 859.504.888.223,19 | 105.606.815.786,70 | 814% | Tidak Efisien |
| 2019 | 943.561.222.062,40 | 100.950.256.993,95 | 935% | Tidak Efisien |
| 2020 | 1.020.120.939.565,77 | 86.319.561.348,87 | 1182% | Tidak Efisien |
| **Rata-rata** | **951%** | Tidak Efisien |

Sumber : Data Diolah, 2022

 Berdasarkan pada tabel 8. perhitungan rasio efisiensi Pada tahun 2016 persentase rasio efisiensi adalah 1069%, pada tahun 2017 rasio efisiensi turun menjadi 754%, Pada tahun 2018 persentase rasio efisiensi naik menjadi 814% pada tahun 2019 persentase rasio efisiensi naik menjadi 935%, dan pada tahun 2020 persentase rasio efisiensi naik menjadi 1182%. rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 951% dikagorikan tidak efisien.

### 4 Rasio Aktivitas

Perhitungan rasio aktivitas pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut :

**Tabel 9. Perhitungan Rasio Aktivitas/Keserasian Belanja (dalam rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah** | **Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah** | **Rasio Operasi** | **Rasio Modal** | **Ket.** |
| B.operas/total belanja x 100% | B. modal/total belanja x 100% |
| 2016 | 604.104.194.685,08 | 205.417.239.958,00 | 75% | 25% | Tidak Serasi |
| 809.943.066.643,08 | 809.943.066.643,08 |
| 2017 | 633.232.759.070,25 | 237.003.593.139,46 | 73% | 27% | Tidak Serasi |
| 870.709.076.209,71 | 870.709.076.209,71 |
| 2018 | 649.516.620.490,95 | 209.920.267.732,24 | 76% | 24% | Tidak Serasi |
| 859.504.888.223,19 | 859.504.888.223,19 |
| 2019 | 689.059.769.341,40 | 254.283.952.721,00 | 73% | 27% | Tidak Serasi |
| 943.561.222.062,40 | 943.561.222.062,40 |
| 2020 | 649.922.041.665,50 | 334.867.453.980,27 | 64% | 33% | Tidak Serasi |
| 1.020.120.939.565,77 | 1.020.120.939.565,77 |
| **Rata-Rata** | **72%** | **27%** | Tidak Serasi |

Sumber : Data Diolah, 2022

 Berdasarkan tabel 9. Perhitungan Rasio Aktivitas/Keserasian Belanja Pada tahun 2016 rasio belanja operasi sebesar 75% Sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 25%, rasio belanja operasi pada tahun 2017 turun menjadi 73%, sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2017 naik dengan persentase 27%, rasio belanja operasi pada tahun 2018 naik menjadi 76% sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2018 turun dengan persentase sebesar 24%, rasio belanja operasi pada tahun 2019 sebesar 73% sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2019 naik dengan persentase sebesar 27%, dan rasio belanja operasi pada tahun 2020 sebesar 64% sedangkan rasio belanja modal pada tahun 2020 naik dengan persentase sebesar 33%. Rata-rata rasio belanja operasi dengan persentase sebesar 72% dan rata-rata rasio belanja modal sebesar 27% dikategorikan tidak serasi.

### 5 Rasio Pertumbuhan

 Perhitungan rasio pertumbuhan pada Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut :

**Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Asli Daerah** | **Pertumbuhan** | **Rasio** | **Kriteria/** |
| PADt-PADt-1 (a) | (b) | b/a x 100% | **Penilaian** |
| 2016 | 75.797.426.519,36 | - | - | - |
| 2017 | 115.521.939.795,78 | 39.724.513.276,42 | 52% | Naik |
| 2018 | 105.606.815.786,70 | -9.915.124.009,08 | -9% | Turun |
| 2019 | 100.950.256.993,95 | -4.656.558.792,75 | -4% | Turun |
| 2020 | 86.319.561.348,87 | -14.630.695.645,08 | -14% | Turun |
| **Rata-rata** | **6%** | **Naik** |

Sumber : Data Diolah, 2022

 Berdasarkan tabel 10. Perhitungan rasio pertumbuhan pada tahun 2017 PAD mengalami pertumbuhan dengan nilai rasio 52%, pada tahun 2018 turun dengan rasio -9%, pada tahun 2019 turun dengan nilai rasio -4% dan pada tahun 2020 turun dengan rasio -14%. Rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 6%.

**Tabel 11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Daerah** | **Pertumbuhan** | **Rasio** | **Kriteria/** |
| Pt-Pt-1 (a) | (b) | b/a x 100% | **Penilaian** |
| 2016 | 883.629.694.929,98 | - | - | - |
| 2017 | 906.258.990.999,98 | 22.629.296.070,00 | 3% | Naik |
| 2018 | 923.898.833.425,26 | 17.639.842.425,28 | 2% | Naik |
| 2019 | 1.029.631.473.221,94 | 105.732.639.796,68 | 11% | Naik |
| 2020 | 1.026.932.400.770,59 | -2.699.072.451,35 | - 0,26% | Turun |
| **Rata-rata** | **4%** | **Naik** |

Sumber : Data Diolah, 2022

 Berdasarkan tabel diatas, rasio pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2020. pada tahun 2017sebesar 3%, pada tahun 2018 rasio pertumbuhan turun menjadi 2%, pada tahun 2019 naik menjadi 11% dan pada tahun 2020 turun dengan rasio -0,26%. Rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 4%.

**Tabel 12. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Belanja Daerah** | **Pertumbuhan** | **Rasio** | **Kriteria/** |
| Bt-Bt-1 (a) | (b) | b/a x 100% | **Penilaian** |
| 2016 | 809.943.066.643,08 | - | - | - |
| 2017 | 870.709.076.209,71 | 60.766.009.566,63 | 8% | Naik |
| 2018 | 859.504.888.223,19 | -11.204.187.986,52 | -1% | Turun |
| 2019 | 943.561.222.062,40 | 84.056.333.839,21 | 10% | Naik |
| 2020 | 1.020.120.939.565,77 | 76.559.717.503,37 | 8% | Naik |
| **Rata-rata** | **6%** | **Naik** |

Sumber : Data Diolah, 2022

 Berdasarkan tabel diatas, rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2020. pada tahun 2017sebesar 8%, pada tahun 2018 rasio pertumbuhan belanja daerah turun menjadi -1%, pada tahun 2019 naik menjadi 10% dan pada tahun 2020 turun dengan rasio 8%. Rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 6%.

## 3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa atau perhitungan rasio kemandirian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat rendah dilihat dari perhitungan rasio kemandirian pada tahun 2016-2020 rasio kemandirian rata-rata mencapai 12% tergolong rendah sekali dan berpola instruktif. Menurut (Halim, 2007 dalam Qur’ani & Panggiarti, 2021) Pola hubungan “instruktif” adalah peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Hasil penelitian terdahulu (Hartoyo & Arsad, 2021) bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif rasio ini sebesar 7,17% dengan keterangan sangat rendah.

 Rasio efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah 82%. Dikategorikan kurang efektif. Hasil Penelitian terdahulu (Kusumadewi, 2021) dengan judul penelitian ”Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 2015-2019.” Dalam hasil penelitian bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kurang optimal dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup efektif.

 Rasio efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 951% dikategorikan Tidak Efisien, berdasarkan kriteria tingkat efisiensi kinerja keuangan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019, hlm. 142) semakin kecil rasio efisiensinya maka tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin baik maka sebaliknya. Hasil Penelitian terdahulu (Setiawan, 2021) dengan judul penelitian “Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018: Imajiner atau Realita?” menunjukkan Rasio efisiensi dinilai kurang efisien mengelola keuangan dengan trend rasio hampir 100 persen.

 Rasio aktivitas Rasio aktivitas 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio belanja operasi dengan persentase sebesar 72% dan rata-rata rasio belanja modal sebesar 27% dikategorikan Tidak Serasi. sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau dialokasikan dari total belanja daerah lebih besar dipergunakan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal.

 Rasio Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kota lubuklinggau dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 6% dikategorikan Naik atau mengalami pertumbuhan. Rasio pertumbuhan Pendapatan daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau mencapai 4% dikategorikan Naik atau mengalami pertumbuhan. Rasio pertumbuhan belanja daerah menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan mencapai 6% dikategorikan Naik. Hasil Penelitian terdahulu (Fornia dkk., 2021) dengan judul penelitian “Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019” dalam penelitiannya bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,16 persen.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Kemandirian periode 2016-2020 tergolong rendah sekali. Kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Efektivitas periode 2016-2020 tergolong kurang efektif. Rata-rata rasio efektivitas adalah 82%. Dalam hal ini Pemerintah Kota Lubuklinggau belum optimal dalam memobilisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio efisiensi periode 2016-2020 dapat dikatakan tidak efisien. Rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 951%. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat minim dibandingkan dengan biaya pengeluaran daerah keseluruhan yang sangat besar. Kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Aktivitas periode 2016-2020 dikategorikan tidak serasi. rasio aktivitas dengan rata-rata rasio belanja operasi adalah 72%, sedangkan rata-rata rasio belanja modal adalah 27%.

Kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau ditinjau dari Rasio Pertumbuhan periode 2016-2020 dapat dikatakan baik karena menunjukkan nilai rasio yang positif. Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 6%, Rasio pertumbuhan pendapatan daerah pemerintah kota lubuklinggau 4%, dan Rasio pertumbuhan belanja daerah menunjukkan rata-rata rasio pertumbuhan mencapai 6%.

# DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, I. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan* (4 ed.). ALFABETA.

Fornia, E., Mukhzarudfa, M., & Gowon, M. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *6*(1), 34–44. https://doi.org/10.22437/jaku.v6i1.13301

Hartoyo, H., & Arsad, A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU). *JURNAL PENDIDIKAN DAN EKONOMI (PENKOMI)*, *4*(1), 1–17. https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.437

Hery. (2020). *Analisis Laporan Keuangan* (6 ed.). PT Gramedia.

Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.

Kapoh, L. E. C., Rotinsulu, D. C., & Maramis, M. T. B. (2020). ANALISIS KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MANADO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *20*(03), Article 03. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30645

Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (8 ed.). Rajawali Pers.

Kusumadewi, V. P. (2021). *KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015-2019*. *6*, 17–29.

Mahmudi. (2019). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4 ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahsun, Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik* (3 ed.). BPFE-YOGYAKARTA.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. ANDI OFFSET.

Peraturan Walikota Lubuklinggau. (2019). *Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau*.

Qur’ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). THE ANALYSIS OF TERRITORY FINANCIAL RATIO AS PERFORMANCE VALUE IN THE GOVERNMENT OF MAGELANG CITY. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 11.

Setiawan, T. (2021). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016-2018 :IMAJINER ATAU REALITA ?* *1*, 12.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntasi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.